

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sarana untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dimana kondisi keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangannya. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2018 laporan keuangan lengkap terdiri dari : laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi investor. Salah satu kriteria informasi keuangan yang relevan adalah timeless atau ketepatan waktu, keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan mengurangi kebermanfaatan dari laporan keuangan (Harmono 2015). Di Indonesia, batas waktu pelaporan laporan keuangan diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan LK Nomor: Kep431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 yang menyebutkan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang telah diaudit oleh auditor paling lama adalah 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan auditannya akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan undangundang. Peraturan-peraturan ini dibuat tentunya dengan tujuan agar perusahaan publik bisa mempublikasikan

laporan keuangan auditannya secara tepat waktu sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan Hasil pemantauan dari IDX 5 tahun terakhir yakni tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 tercatat di setiap tahunnya perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. 31 desember 2015 sebanyak 18 perusahaan, untuk tahun 2016 sebanyak 17 perusahaan, sedangkan tahun 2017 sebanyak 10 perusahaan, tahun 2018 sebanyak 10 perusahaan, dan terakhir tahun 2019 sebanyak 64 perusahaan. Dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Padahal, penundaan pelaporan keuangan yang tidak semestinya akan menghilangkan tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan tersebut (Harmono, 2015:20).

Salah satu perusahaan *go public* dalam industri penerbangan yang mengalami keterlambatan pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit adalah PT. AirAsia Indonesia Tbk. Perusahaan penerbangan ini melaporkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diaudit pada tanggal 28 Juli 2020. Laporan keuangan PT. AirAsia Indonesia Tbk. telah diaudit menunjukkan bahwa tingkat total hutang perusahaan melebihi 90% dari total asset yang dimiliki perusahaan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan auditor Ernst & Young pada laporan keuangan PT AirAsia Indonesia Tbk. yang menyatakan bahwa perusahaan diindikasikan memiliki suatu ketidakpastian material untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Dampak dari tingginya tingkat hutang perusahaan penerbangan tersebut menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemeriksaan secara detail, sehingga penyampaian laporan keuangan yang diaudit menjadi terlambat (<https://www.cnnindonesia.com>)

Perusahaan go publik di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Semua perusahaan yang go publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Penilaian akuntan publik terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan pemegang saham dan kreditor dalam

pengambilan keputusan. Hasil penilaian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk pendapat kewajaran laporan keuangan yang disebut sebagai opini audit.

Auditor dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggungjawab penuh atas opini audit laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan independensi dan profesionalisme auditor dalam memberikan opini audit. Hal ini didukung oleh adanya sejumlah sanksi yang diterapkan bagi setiap pelanggaran independensi dalam audit laporan keuangan (Wiguna, 2015). Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik di atur dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, salah satu contohnya yaitu pembekuan izin. Auditor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pada standar pekerjaan lapangan diatur bahwa (1) pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya, (2) dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, (3) bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (IAPI, 2011:150.1).

Pemilihan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi karena sektor tersebut menjadi salah satu sektor unggulan dalam upaya pemerataan pertumbuhan di seluruh Indonesia. Beberapa perusahaan sektor konstruksi dan infrastruktur menorehkan kinerja keuangan yang baik selama semester pertama tahun 2017. Sebanyak 14 perusahaan sektor konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pertumbuhan laba sebesar 83%, dibandingkan semester pertama 2016. Sektor infrastruktur mampu memberikan dampak berantai (multiplier effect) dan menjadi pembuka bagi bangkitnya sektor lain. Sektor infrastruktur diharapkan mendorong penurunan biaya logistik yang ditargetkan berada level 20% dari PDB pada 2019.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data investasi rill pada semester I 2019 yang menunjukkan bahwa investasi paling besar berada pada sektor usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi yakni sebesar Rp 71,8 triliun. Perolehan investasi dengan kinerja sektornya di pasar modal. Indeks sektor

infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama *year to date* naik 12,47% hingga Jumat (2/8). Sektor ini mencatatkan kinerja paling tinggi dibanding sektor lainnya. Pada sektor telekomunikasi, emiten PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ([TLKM](#)) menjadi yang terbesar mendukung sektor ini yang mewakili 51,5% dengan menguat 14,13% ytd, kemudian disusul PT XL Axiata Tbk ([EXCL](#)) yang berkontribusi 4,23% menguat 64,65% ytd. Selanjutnya, PT Smartfren Telecom Tbk ([FREN](#)) yang berkontribusi 4,17% menguat 125,64% ytd dan terakhir PT Indosat Ooredoo Tbk ([ISAT](#)) yang berkontribusi 2,15% menguat 93,47% ytd. kontribusi kedua berasal dari subsektor transportasi 12,1% dengan menguat 4,26%. PT Jasa Marga Tbk ([JSMR](#)) tentunya juga punya kontribusi pada sektor ini sebesar 5,13% dengan menguat 37,3% ytd. Terakhir pada sektor infrastruktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ([TBIG](#)) berkontribusi kontribusi 2,3% menguat 16,67% ytd. (<https://investasi.kontan.co.id/>)

Banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi audit delay pada suatu perusahaan salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Perusahaan yang tergolong besar melaporkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat aktiva yang tinggi akan segera menyampaikan laporan keuangannya yang memberikan pertanda baik kepada investor. Menurut hasil penelitian Saskya Clarisa & Sonny Pangerapanm (2019) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan mengartikan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin memungkinkan perusahaan mengalami audit delay. Manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit, dan penundaan laporan keuangan disebabkan perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator. Namun menurut Ayemere dan Elijah (2015) yang meneliti faktor penentu audit delay pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nigeria menggunakan panel least squares regression analysis, menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak yang positif yang signifikan terhadap audit delay.

Faktor selanjutnya yang mungkin mempengaruhi audit delay adalah tingkat rasio solvabilitas atau yang sering juga di sebut rasio leverage. Suatu perusahaan dikatakan solvabilitas apabila perusahaan tersebut mempunyai aset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Begitu juga sebaliknya apabila proporsi hutang lebih besar dari asetnya akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Sehingga, akan terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan auditan.

Berdasarkan hasil penelitian Fauziyah & Waluyo (2016) yang dilakukan diketahui bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Windy Aginta, & H.Syamsul Bahri Surbakti (2019) Secara Parsial, hasil menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay. Sedangkan menurut hasil penelitian Ayemere & Elijah (2015) dan Khoufi (2018) leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.

Selanjutnya penelitian ini juga akan menguji pengaruh opini audit menurut hasil penelitian Malinda Dwi Apriliane (2015) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* akan mengalami audit delay yang semakin lama, hal ini disebabkan karena proses pemberian audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit yang lebih senior. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*, audit delay cenderung lebih pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan yang berisi berita baik (*good news*). Dan Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2013. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sayidah & Irwan Adiraya (2018) opini auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Opini auditor tidak mempengaruhi audit delay karena hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan KAP untuk memberi pernyataan. Adanya keengganan auditor untuk mengeluarkan kualifikasi dan manajemen untuk menerima hasil pengauditan, dapat terjadi dalam lingkungan yang secara struktur hukum dan profesionalitas belum terbentuk dengan baik.

Beberapa perbedaan pendapat diatas membuat penulis tertulis tertarik untuk melanjutkan penelitian terdahulu, dan penulis memberi judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2019 “**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019..
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian bagi para akademisi dan menambah wawasan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dalam perluasan teori dan konsep untuk mengetahui audit delay.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang ukuran perusahaan, total pendapatan dan opini audit terhadap audit delay sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. Selain itu dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat untuk pengguna jasa investasi dalam mengetahui alasan keterlambatan laporan audit di perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.